

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan administrasi publik yang bertujuan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, kinerja pemerintah, serta kesejahteraan masyarakat. Administrasi publik digunakan untuk merencanakan, menjalankan, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dibuat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah yang merubah sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya.

Pemerintah pusat melakukan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan dan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah diajak untuk mengelola rumah tangga pemerintahannya sendiri secara mandiri, adil dan demokratis.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu, semakin tinggi pendapatan retribusi akan semakin meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Perencanaan penetapan retribusi yang baik akan menghasilkan jumlah retribusi yang maksimal.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purwakarta dan rencana teknis bangunan, maka perlu diatur perizinan pendiriannya atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berikut proses perencanaannya dapat kita lihat dalam gambar dibawah ini:

**Gambar 1.1**



*Sumber: Dinas Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Purwakarta*

Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwa dalam proses perencanaan hanya melibatkan dua instansi yakni Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari hasil wawancara dengan bagian pengelolaan data evaluasi dan pelaporan, penetapan target retribusi yang ditetapkannya disepakati oleh dua instansi tanpa melibatkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam penetapannya, padahal DPMPTSP mempunyai peran di dalam pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan sebagai eksekutor pembuatan izin yang hendak mendirikan bangunan kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan. Berikut rincian anggaran pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Purwakarta :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi			
		Realisasi (Rp)	%	Selisih (Rp)	%
2014	21.271.591.500	25.545.984.500	120,09	4.274.393.000	20,09
2015	25.000.000.000	17.863.619.450	71,45	7.136.380.550	-28,55
2016	23.500.000.000	10.602.111.200	45,11	12.897.888.800	-54,89
2017	15.000.000.000	9.617.709.200	64,11	5.382.290.800	-35,89

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi pada tahun 2014 mengalami pencapaian yang melebihi dari 100%. Kemudian pada tahun 2015 target penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dinaikkan akan tetapi pada realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan dan hanya mencapai 71,45% dari target, pada tahun 2016 target retribusi diturunkan agar bisa memenuhi target namun pada realisasinya belum bisa mencapai target yang telah ditentukan yakni sebesar 45,11%, dan pada tahun 2017 target retribusi kembali diturunkan akan tetapi pada realisasinya tetap belum mencapai target yang ditetapkan dan hanya mencapai 64,11%.

Pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami penurunan realisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan, tidak hanya pendapatannya saja yang menurun tetapi target realisasinya-pun ikut menurun. Menurut hasil wawancara awal penulis dengan Ibu Meta selaku Kasi Pengelolaan Data Evaluasi dan Pelaporan, ditemukan faktor penyebab penurunan pendapatan

retribusi izin mendirikan bangunan, salah satunya disebabkan oleh pihak yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan dan sudah melengkapi syarat-syarat pengajuan permohonan, setelah pihak Dinas Tata Ruang dan Permukiman mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu dan dibuatkan surat izin mendirikan bangunan kepada pihak yang mengajukan, akan tetapi pihak yang mengajukan permohonan tidak mengambil surat izin tersebut yang menyebabkan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan tidak mencapai target. Berikut rincian penerbitan surat izin mendirikan bangunan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**Tabel 1.2**  
**Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah pengajuan</b>	<b>Izin Terbit</b>	<b>Tidak Terbit</b>	<b>Izin Tidak Terbit (%)</b>
2014	829	702	127	15,3%
2015	812	751	61	7,5%
2016	975	865	110	11%
2017	1025	834	191	18,6%
<b>Jumlah</b>	<b>3.641</b>	<b>3.152</b>	<b>489</b>	<b>29,6%</b>

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat surat izin yang telah diterbitkan dan yang telah diterbitkan namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak pengajuan izin mendirikan bangunan. Pada tahun 2014 surat izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan dan ditindaklanjuti oleh pihak pengajuan izin mendirikan bangunan ada 702 surat izin, dan surat izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan namun tidak ditindaklanjuti ada 127 surat izin. Jika dilihat dari target pada tahun 2014 yang sebesar Rp. 21.271.591.500 dan realisasinya yang mencapai angka sebesar Rp. 25.545.984.500, maka jika hanya mengandalkan surat izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan dan terealisasi pada tahun 2014 dapat dikatakan bahwa surat izin tersebut tidak bisa mencapai angka yang telah ditargetkan pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan surat izin yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya ditindaklanjuti kembali pada tahun 2014 oleh pihak pengajuan izin mendirikan bangunan yang menyebabkan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2014 telah mencapai target yang ditentukan. Walaupun pada tahun 2014 realisasinya telah mencapai target yang telah ditentukan, tidak sama halnya dengan tahun-tahun berikutnya yang realisasinya mengalami penurunan yang signifikan tiap tahunnya.

Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan salah satu retribusi yang dibutuhkan hampir setiap orang, baik oleh perusahaan-perusahaan atau badan. Pada dasarnya semua orang membutuhkan tempat untuk tinggal, maka orang tersebut akan membangun tempat tinggal. Untuk membangun tempat tinggal tersebut orang membutuhkan izin untuk mendirikan bangunan. Namun ada saja masyarakat yang tidak menyadari atau tidak memahami akan hal tersebut.

Sehingga ada sebagian orang yang tidak memohon izin untuk mendirikan bangunan. Hal inilah yang dapat berdampak buruk pada pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan indikasi masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERENCANAAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diperoleh, realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada tiga tahun terakhir (2015-2017) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tidak tercapainya target dan mengalami penurunan tiap tahunnya. Terdapat beberapa kendala yang teridentifikasi mempengaruhi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan, seperti :

1. Masih terdapat bangunan yang telah dibangun tanpa adanya surat Izin Mendirikan Bangunan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan surat Izin Mendirikan Bangunan, masyarakat baru memerlukan surat Izin Mendirikan

Bangunan apabila rumah dan tanah mereka akan digunakan untuk proses peminjaman ke Bank atau diperjual belikan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas, rumusan masalah yang dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Purwakarta ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat tingkat penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Purwakarta ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perencanaan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat tingkat penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Purwakarta.



## **E. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Akademis**

1. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi S1 pada program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam hal perencanaan.
3. Untuk menambah wawasan peneliti mengenai perencanaan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Purwakarta.

### **b. Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi instansi terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa depan khususnya dalam hal perencanaan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di wilayah administratifnya.
2. Dapat menerapkan ilmu serta pengetahuan yang ditetapkan dari almamater ke dalam praktik dunia usaha nyata.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mengenai perencanaan penerimaan izin retribusi mendirikan bangunan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pelaksanaan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menganut prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, telah memberi kewenangan kepada daerah otonom untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang antara lain bersumber dari retribusi daerah. Tindak lanjut dari pemberian kewenangan tersebut, antara langsung menuntut Pemerintah Daerah selaku regulator dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah untuk menetapkan kebijakan daerah menyangkut retribusi daerah tersebut dalam bentuk peraturan daerah, sebagai dasar hukum dan implementasinya.

Penerapan kebijakan IMB ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang oleh berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah di Kabupaten Purwakarta.

Walaupun telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai dasar hukum untuk mengimplementasikan kebijakan IMB, ada kecenderungan bahwa implementasi perencanaan terhadap izin mendirikan bangunan di Kabupaten Purwakarta belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan.

Penulis memilih teori perencanaan menurut Robbins and Coulter untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian yang akan penulis lakukan mengenai Implementasi Perencanaan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Di dalam proses perencanaan terdapat dua hal yang menjadi garis besar perencanaan yaitu penetapan target dan cara untuk mencapai target tersebut. Di dalam perencanaan terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Meninjau kembali misi atau tujuan organisasi (*Review the organization's mission, or purpose*).
2. Mengevaluasi potensi sumber daya yang tersedia (*evaluate available resources*).
3. Menentukan target bagi organisasi tersebut secara individual atau dengan organisasi yang berkaitan (*determine the goals individually or with input from others*).
4. Menetapkan dan melegalkan target dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya secara transparan (*Write down the goals and communicate them to all who need to know*).
5. Mengkaji hasil, melihat tercapai atau tidaknya target, dan menggantinya jika tidak tercapai (*Review result and whether goals are being met*).

(Robbins and Coulter, 2012 : 210)

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi perencanaan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta merupakan masalah yang meliputi aspek-aspek perencanaan sebagaimana yang disebutkan oleh Robbins and Coulter, yaitu aspek target dan cara pencapaian target tersebut. Oleh karena itu, penulis

menggunakan proses perencanaan oleh Robbins and Coulter sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian, karena teori tersebut dianggap relevan untuk menganalisis dalam implementasi perencanaan penerimaan retribusi oleh Dinas Penanaman Badan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.



**Gambar 1.2**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

